

SIKAP PUBLIK NASIONAL TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945

Updated Survei Nasional:
15 – 21 September 2021

Latar Belakang

- Sampai sekarang Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dan akhir–akhir ini muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya untuk mengamandemen kembali UUD 1945.
- Aspirasi untuk amandemen yang belakangan ini cukup sering muncul terkait dengan unsur–unsur pokok dalam presidensialisme atau sistem pemerintahan presidensial.
- Aspirasi yang muncul terkait dengan perlunya memberikan wewenang lebih besar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- MPR diharapkan berwenang memilih Presiden.
- MPR diharapkan berwenang merumuskan dan menetapkan Garis–Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau sekarang disebut Pokok–Pokok Haluan Negara (PPHN), yang atas dasar itu presiden harus bekerja.

Latar Belakang

- Aspirasi itu dapat berimplikasi menghapus sistem presidensial (presidensialisme) yang dianut dalam konstitusi sekarang. Mengapa?
- Karena unsur–unsur dasar presidensialisme adalah:
 - 1) Kekuasaan bersifat ganda: eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR dan DPD) sama–sama independen dan sama–sama dipilih rakyat langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat lewat pemilihan umum. Keduanya tidak bisa saling membubarkan.
 - 2) Presiden, seperti halnya DPR/DPD berkuasa untuk periode yang fixed (tetap) sehingga tidak bisa diberhentikan di luar mekanisme pemilihan umum kecuali melanggar undang–undang.

Latar Belakang

- 3) Presiden bekerja sesuai dengan program yang dijanjikannya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan umum bukan menurut garis-garis yang ditetapkan MPR (DPR dan DPD).
- Keinginan agar Presiden dipilih oleh MPR (yang terdiri dari DPR dan DPD) membuat presiden bertanggung jawab kepada MPR, dan akibatnya MPR dapat memberhentikan presiden kapan saja dipandang perlu oleh kekuatan mayoritas di MPR.
- Bila presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR maka ada tuntutan agar presiden mengikuti GBHN tersebut, dan seperti dalam sistem sebelum menganut presidentialisme, keterikatan presiden pada GBHN dimungkinkan karena presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Latar Belakang

- Di samping itu muncul aspirasi agar amandemen dilakukan terhadap pasal di UUD tentang masa berkuasa presiden yang dibatasi maksimal hanya dua kali menjadi lebih dari dua kali.
- Pembatasan masa kekuasaan presiden ini amanat reformasi karena pengalaman selama ini bahwa tanpa batasan tersebut bangsa Indonesia menghadapi masalah besar, seperti di masa Orde Lama maupun Orde Baru.
- Masa jabatan presiden yang dibatasi hanya 2 periode adalah gejala umum dalam presidensialisme di dunia.

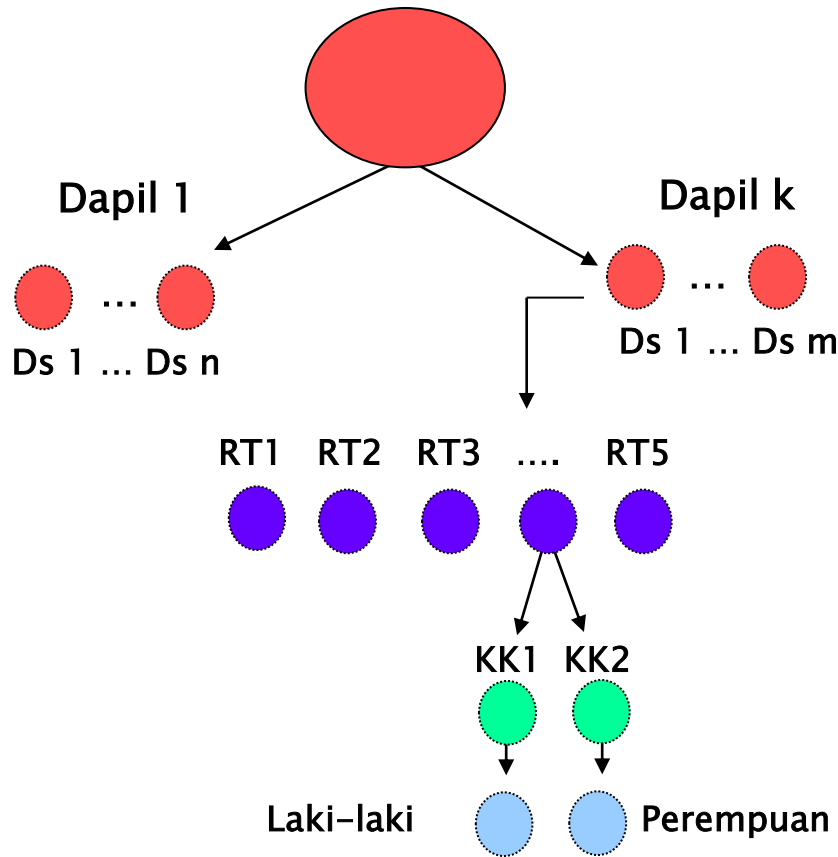
Latar Belakang

- Karena berkaitan dengan dasar negara, UUD yang bersifat fundamental, sebaiknya diketahui bagaimana publik bersikap terhadap isu-isu amandemen tersebut.
- Survei opini publik nasional adalah satu cara untuk mengetahui sikap publik tersebut.
- Presentasi ini melaporkan hasil survei nasional tersebut.

Metodologi

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80%. Sebanyak 981 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar $\pm 3,19\%$ pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
- Waktu wawancara lapangan 15 – 21 September 2021.

Flow chat penarikan sampel



Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat Dapil dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan

Validasi Sampel

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	50.4	50.0
Perempuan	49.6	50.0
DESA-KOTA		
Pedesaan	50.3	50.2
Perkotaan	49.7	49.8
USIA		
<= 20 tahun	10.1	10.3
21-25 tahun	12.6	12.5
26-30 tahun	13.4	13.5
31-35 tahun	11.8	12.0
36-40 tahun	11.5	11.6
41-45 tahun	9.8	9.8
46-50 tahun	8.8	8.6
51-55 tahun	6.4	6.6
56-60 tahun	5.1	5.1
> 60 tahun	10.4	10.1

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
AGAMA		
Islam	87.6	87.3
Protestan/Katolik	10.5	9.8
Lainnya	1.9	3.0
ETNIS		
Jawa	40.8	40.2
Sunda	13.9	15.5
Batak	3.7	3.6
Madura	3.2	3.0
Betawi	2.6	2.9
Bugis	3.1	2.7
Minang	2.3	2.7
Lainnya	30.4	29.4

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

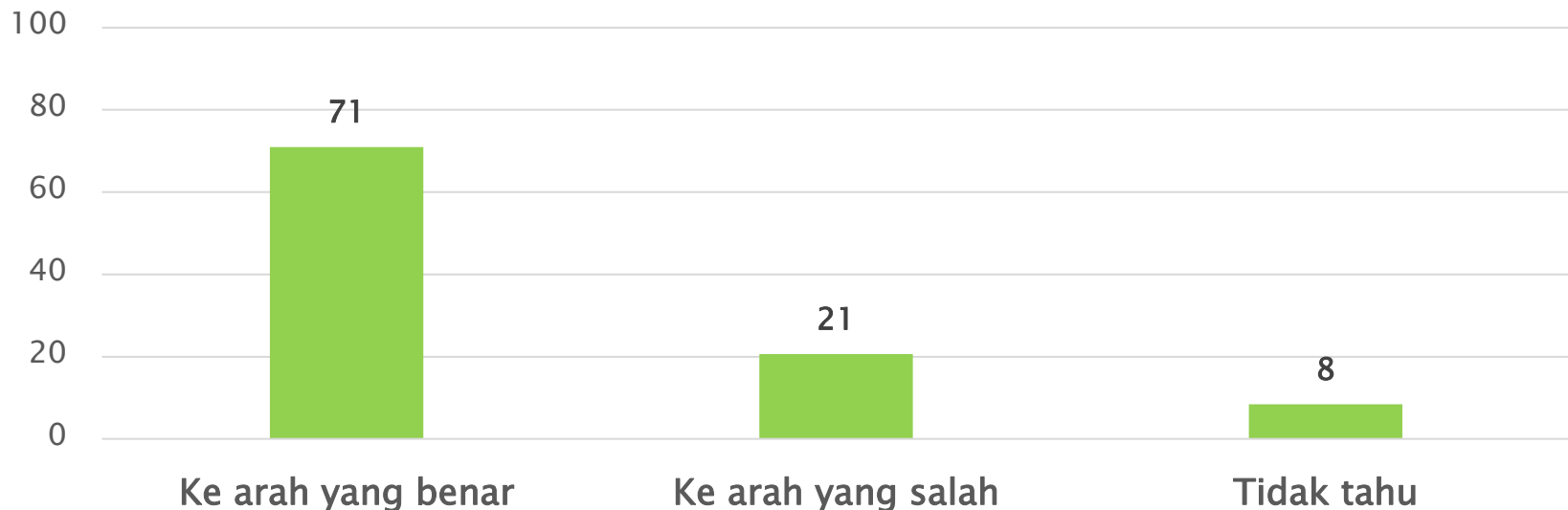
KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
Aceh	2.0	1.8
Sumatera Utara	5.5	5.1
Sumatera Barat	1.5	1.9
Riau	1.9	2.0
Jambi	1.5	1.3
Sumatera Selatan	3.7	3.1
Bengkulu	0.9	0.7
Lampung	3.0	3.2
Bangka Belitung	1.0	0.5
Kepulauan Riau	0.9	0.6
DKI Jakarta	3.9	4.1
Jawa Barat	15.3	17.4
Jawa Tengah	15.0	14.6
DI Yogyakarta	1.8	1.4
Jawa Timur	16.3	16.2
Banten	3.6	4.3
Bali	1.2	1.6

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NTB	1.5	1.9
NTT	2.0	1.8
Kalimantan Barat	1.1	1.9
Kalimantan Tengah	0.7	0.9
Kalimantan Selatan	2.0	1.5
Kalimantan Timur	1.8	1.3
Kalimantan Utara	0.9	0.2
Sulawesi Utara	0.6	1.0
Sulawesi Tengah	0.9	1.0
Sulawesi Selatan	2.0	3.2
Sulawesi Tenggara	1.0	0.9
Gorontalo	0.9	0.4
Sulawesi Barat	0.9	0.5
Maluku	0.6	0.7
Maluku Utara	1.0	0.4
Papua Barat	1.0	0.4
Papua	1.6	1.9

ARAH PERJALANAN BANGSA

Arah Perjalanan Bangsa

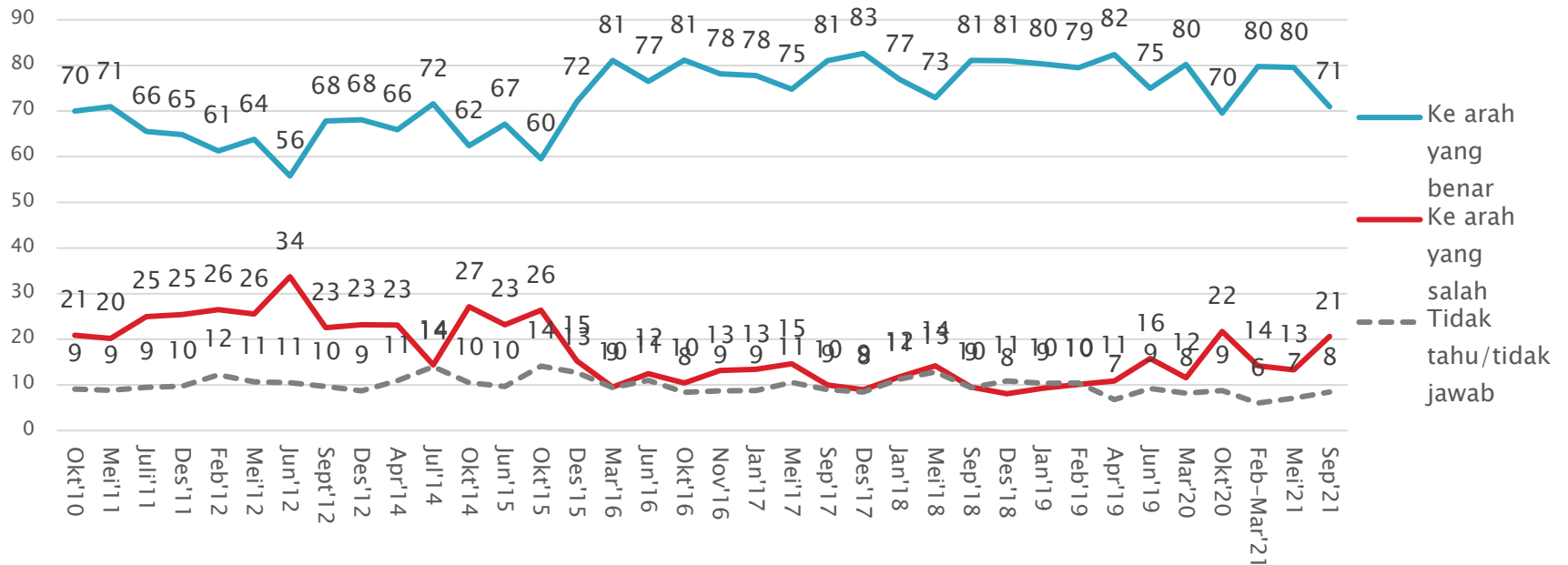
Secara umum bagaimana Ibu/Bapak melihat arah negara kita? Apakah negara kita sekarang sedang bergerak ke arah yang benar atau ke arah yang salah? ... (%)



Ada 71% yang menilai negara Indonesia sekarang sedang bergerak ke arah yang benar, sementara 21% menilai bergerak ke arah yang salah. Yang tidak tahu 8%.

Tren 2010–2021: Arah Perjalanan Bangsa

Bagaimana Ibu/Bapak melihat arah perjalanan negara kita? Apakah negara kita sekarang berjalan menuju ke arah yang benar atau ke arah yang salah? ...(%)



Sentimen positif terhadap arah bangsa dalam survei September 2021 sekitar 71%. Meskipun berfluktuasi, dalam 11 tahun terakhir penilaian positif terhadap arah bangsa sekarang masih tinggi.

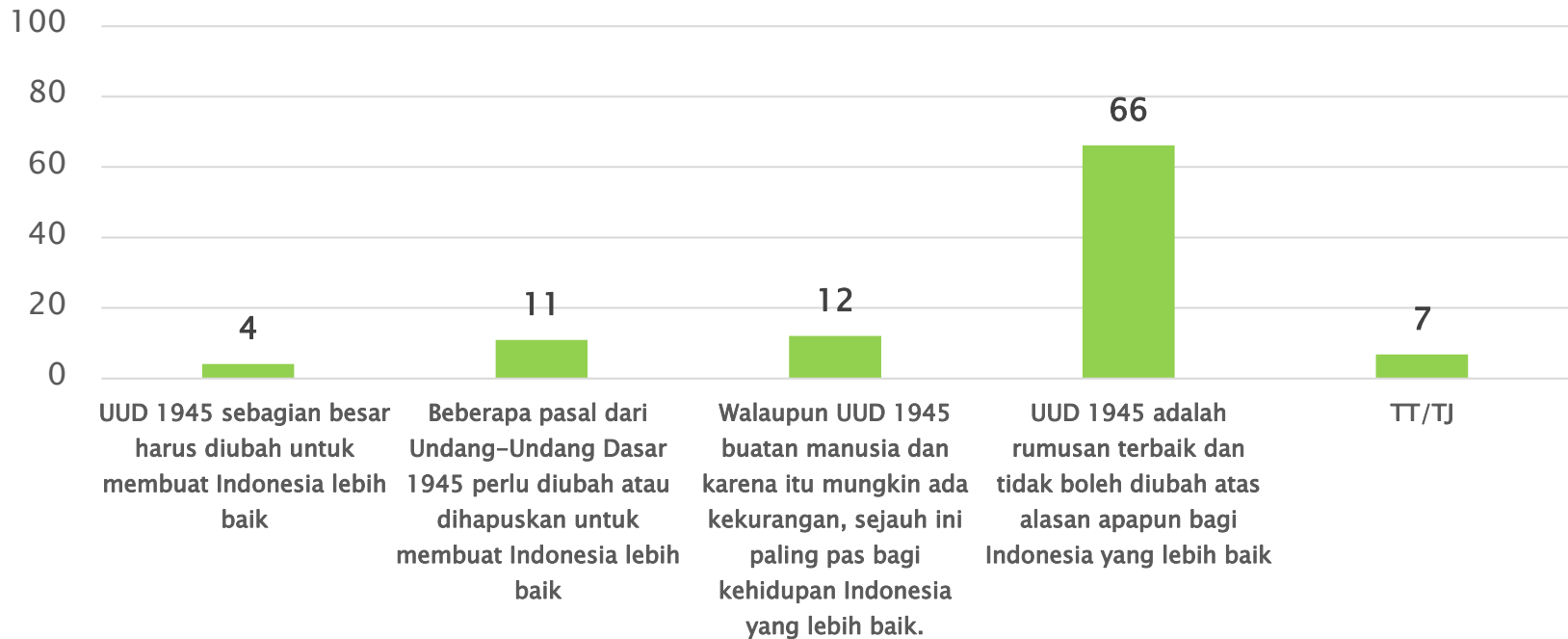
Temuan

- ▶ Evaluasi dasar atas kondisi bangsa harus terkait dengan arah bangsa ini, apakah bangsa ini sedang berjalan menuju arah yang benar atau salah.
- ▶ Apapun yang terjadi, bila warga umumnya menilai bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar, maka keberadaan bangsa ini legitimate, dan ini merupakan modal politik massa yang sangat penting.
- ▶ Secara umum, warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar (71%).
- ▶ Meskipun berfluktuasi, dalam 11 tahun terakhir penilaian positif terhadap arah bangsa sekarang masih tergolong tinggi.
- ▶ Dalam sentimen publik yang positif ini muncul aspirasi elite untuk mengubah konstitusi. Publik sendiri bersikap seperti apa?

SIKAP UMUM TENTANG UUD 1945

Pendapat tentang UUD'45

Ada pendapat berikut tentang Negara kita yang berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pendapat mana yang paling Ibu/Bapak setuju? ... (%)



Mayoritas warga, 66%, menilai UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik; dan ada 12% yang menilai bahwa walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik. Ada 11% yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus, dan ada 4% yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah. Yang tidak tahu 7%.

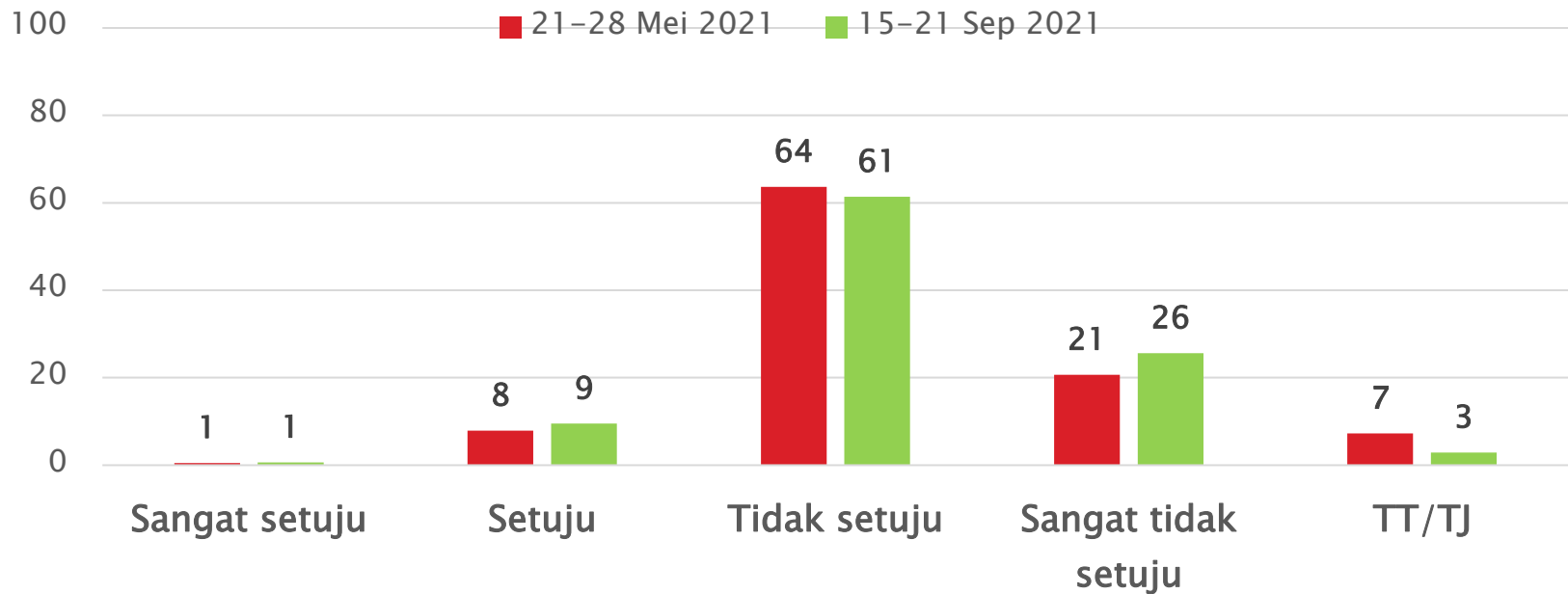
Temuan

- ▶ Secara umum warga tidak menghendaki perubahan UUD 1945.
- ▶ Mayoritas warga, 66%, menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik.
- ▶ Ada 12% yang menilai bahwa walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.
- ▶ Ada 11% yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus.
- ▶ Ada 4% yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah.
- ▶ Yang tidak tahu atau tidak menjawab 7%.

SISTEM PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN

Setuju atau Tidak: Presiden Tidak Dipilih Langsung tapi Dipilih MPR?

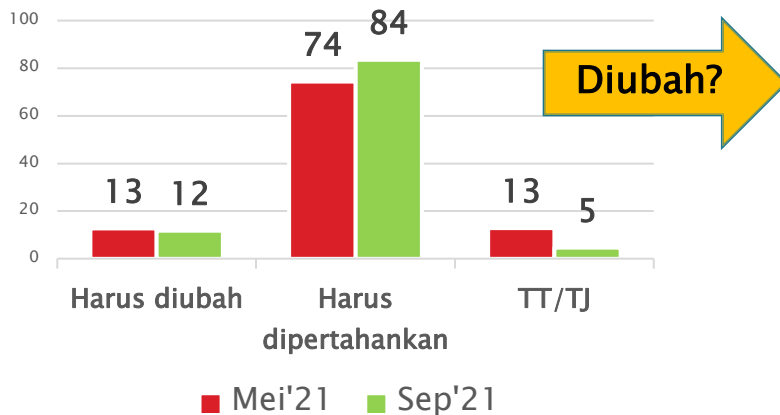
Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut? ... (%)



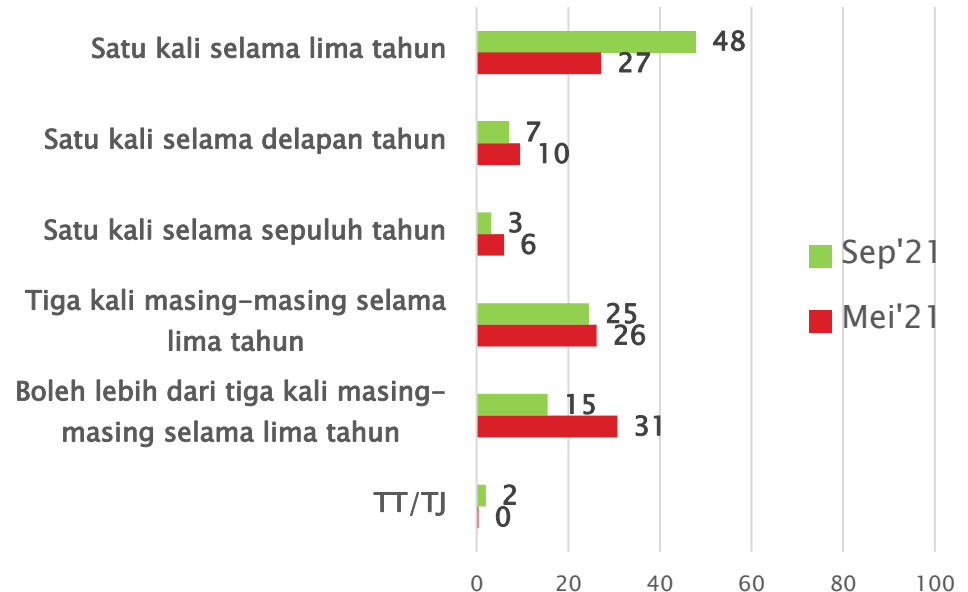
Mayoritas warga, 87%, tidak setuju atau sangat tidak setuju jika Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Yang setuju atau sangat setuju hanya 10%, dan yang tidak tahu 3%. Dari Mei 2021 ke September 2021, yang menolak Presiden dipilih MPR naik dari 85% menjadi 87%.

Masa Jabatan Presiden

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya DUA kali, masing-masing selama LIMA tahun. Menurut Ibu/Bapak apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan? ... (%)



Bila harus diubah, menurut Ibu/Bapak berapa kali sebaiknya masa jabatan presiden? ... (%)

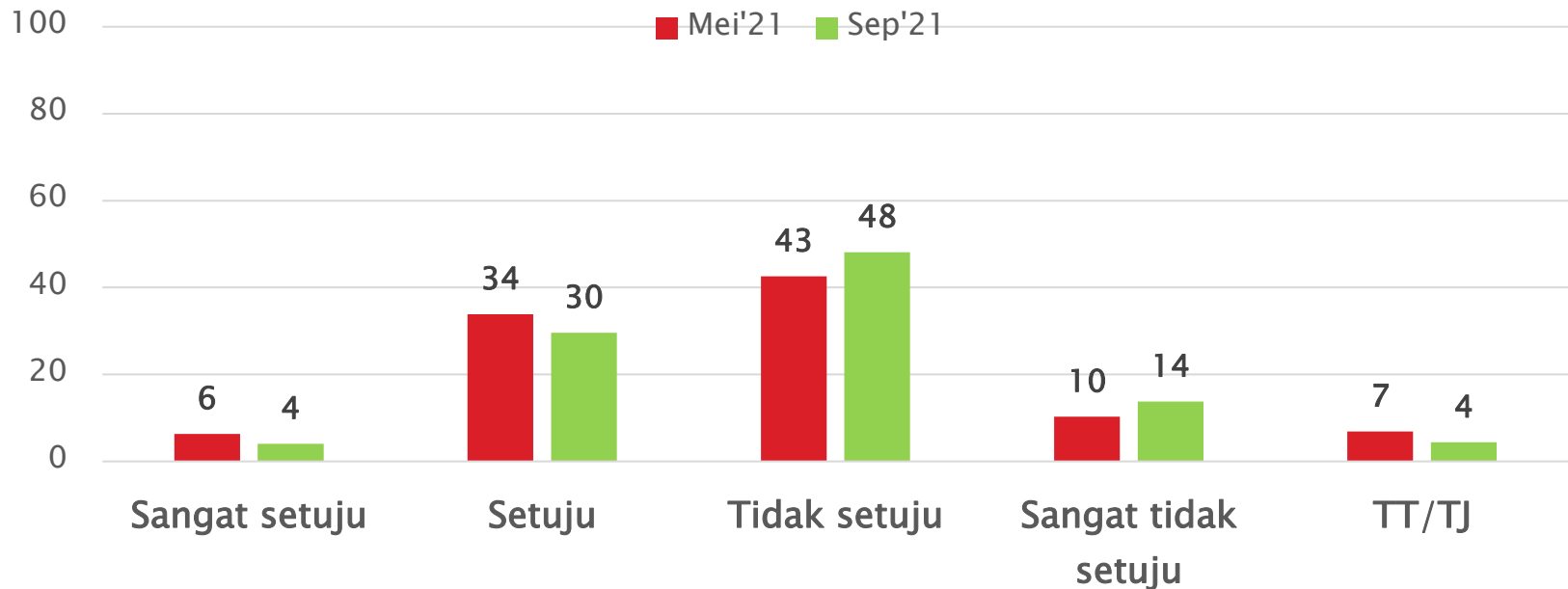


- Mayoritas warga, 84%, menilai ketentuan masa jabatan Presiden maksimal dua kali, masing-masing selama lima tahun, harus dipertahankan. Yang ingin diubah 12%, yang yang tidak tahu 5%. Dari Mei 2021 ke September 2021, yang ingin ketentuan tersebut dipertahankan naik dari 74% menjadi 84%.
- Dari 12% yang menilai harus diubah, ada 58% (7% dari total populasi) yang menilai harus diubah menjadi satu kali (untuk 5, 8, atau 10 tahun), dan ada 40% (5% dari total populasi) yang ingin diubah menjadi lebih dari dua kali (masing-masing 5 tahun).

KET: jumlah tampak tidak 100% karena pembulatan.

Jokowi Menjadi Capres di Pemilihan 2024?

Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti? Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut? ... (%)



Mayoritas warga, 62%, tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Joko Widodo kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti; jauh lebih banyak dibanding yang setuju/sangat setuju (34%). Dari Mei 2021 ke September 2021 yang menolak Jokowi kembali menjadi calon presiden meningkat dari 53% menjadi 62%.

Pendapat tentang Pemilu Diundur ke 2027

Ada dua pendapat berbeda: **pendapat pertama** menyatakan bahwa karena keadaan pandemi COVID-19 yang belum menentu akan berakhir dalam waktu cepat, pemilihan umum 2024 harus diundur menjadi tahun 2027. Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang menjabat sekarang diperpanjang masa jabatannya sampai tahun 2027 tanpa pemilihan umum. Sebaliknya, **pendapat kedua**, walaupun pandemi COVID-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat, pemilihan umum mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan Undang-undang, dan menjadi tanggung jawab hasil pemilu 2024 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 bila ia belum berakhir. Pendapat mana yang Ibu/bapak setuju? ... (%)



Mayoritas warga, 82%, berpendapat bahwa pemilihan umum mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024 walaupun pandemi COVID-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat.

KET: jumlah tampak tidak 100% karena pembulatan.

Temuan

- ▶ Publik umumnya setuju/sangat setuju bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat (87%), bukan oleh MPR.
- ▶ Hanya 10% warga yang setuju/sangat setuju agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh MPR.
- ▶ Dari Mei 2021 ke September 2021, yang setuju Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh MPR naik dari 85% menjadi 87%.

Temuan

- ▶ Publik juga umumnya menghendaki agar masa jabatan presiden 2 kali dipertahankan (84%). Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 12%, dan yang tidak punya sikap 5%.
- ▶ Dari Mei 2021 ke September 2021, yang ingin ketentuan tersebut dipertahankan naik dari 74% menjadi 84%.

Temuan

- ▶ Umumnya publik tidak setuju/sangat tidak setuju Presiden Jokowi kembali mejadi calon presiden untuk ketiga kalinya (62%). Yang setuju/sangat setuju jumlahnya lebih sedikit, 34%, dan yang tidak menjawab 4%.
- ▶ Dari Mei 2021 ke September 2021 yang tidak setuju Jokowi kembali menjadi calon presiden meningkat dari 53% menjadi 62%.

Temuan

- ▶ Pada tingkat dasar, 84% publik ingin presiden 2 periode saja, tapi ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung “2 periode saja” cukup banyak yang goyah sehingga tidak lagi 84% yang menolak Jokowi kembali menjadi calon meskipun yang menolak Jokowi menjadi calon tetap mayoritas (62%).
- ▶ Ada efek Jokowi terhadap sikap publik.

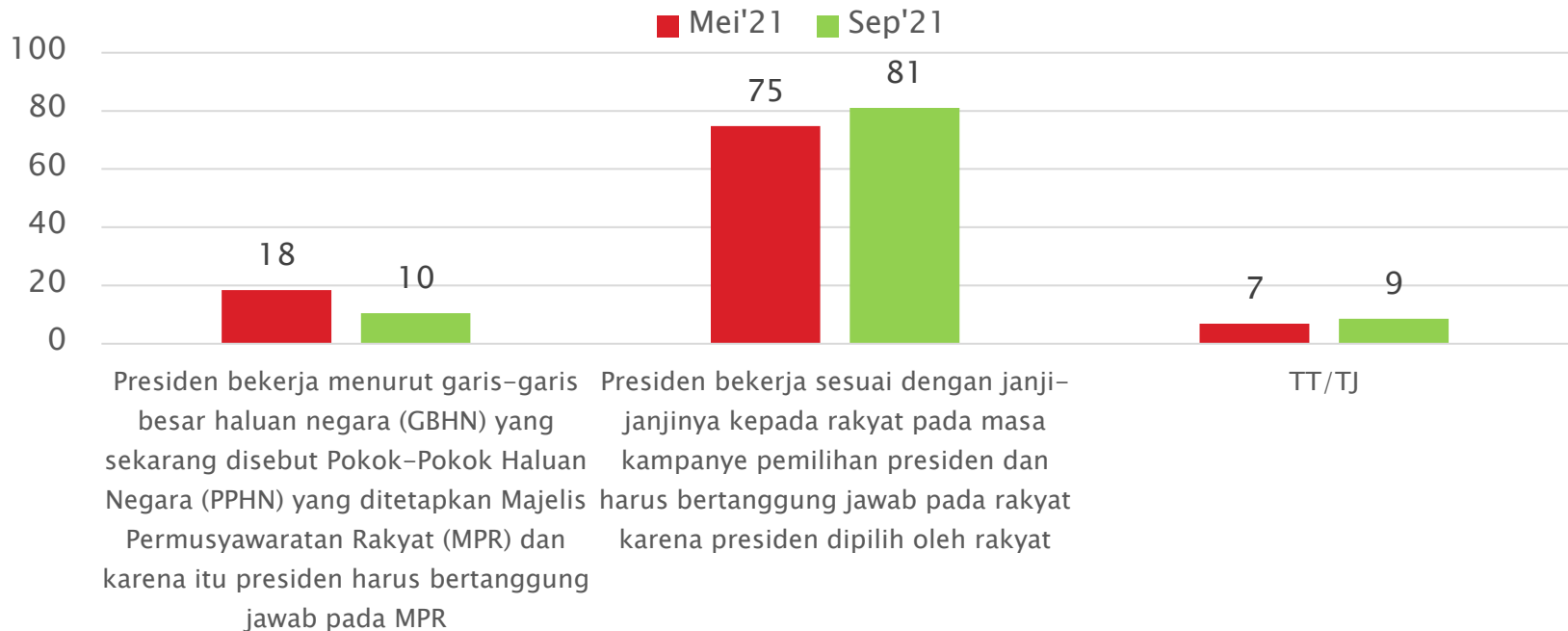
Temuan

- ▶ Publik juga umumnya berpendapat bahwa Pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024, tidak diundur ke 2027, meskipun pandemi COVID-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat (84%).
- ▶ Hanya 13% yang berpendapat Pemilu 2024 harus diundur menjadi tahun 2027.
- ▶ Yang tidak tahu 4%.

Presiden Bekerja Menurut GBHN vs Menurut Janji pada Rakyat di Masa Kampanye

Presiden Bekerja Menurut GBHN atau Sesuai Janjinya pada Masa Kampanye Pilpres?

Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana? ... (%)



- Mayoritas warga, 81%, menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat. Yang ingin presiden bekerja menurut GBHN atau PPHN ada 10%, dan yang tidak tahu 9%.
- Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN, naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021.

Temuan

- ▶ Mayoritas warga, 81%, menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
- ▶ Hanya 10% yang ingin Presiden bekerja menurut GBHN/PPHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR.
- ▶ Sementara yang tidak punya sikap 9%.
- ▶ Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN, naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021.

Sikap terhadap UUD 1945 Menurut Berbagai Kelompok Masyarakat

Sikap terhadap UUD 1945 Menurut Pemilih Partai (%)

		UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik	Beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik	Walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik	UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik	TT/TJ
MASSA PEMILIH PARTAI						
PKB	10.0	7	10	12	69	2
Gerindra	9.9	4	20	10	64	3
PDIP	22.1	5	10	17	65	4
Golkar	11.3	8	2	9	68	13
Nasdem	4.2	0	30	8	62	0
PKS	6.0	7	10	11	66	6
PPP	2.3	0	12	3	79	5
PAN	1.4	0	7	0	93	0
Demokrat	8.6	3	12	13	65	7
Lainnya	5.5	0	9	11	72	8
TT/TJ	18.8	2	9	12	62	14

Mayoritas dari setiap pemilih partai tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Sikap terhadap UUD 1945 menurut Pemilih Capres 2019 dan Kepuasan atas Kinerja Jokowi (%)

		UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik	Beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik	Walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik	UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik	TT/TJ
MASSA PEMILIH CALON PRESIDEN 2019						
Joko Widodo - Ma'ruf Amin	55.5	4	9	12	70	5
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	44.5	7	11	11	64	7
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN JOKOWI						
Sangat/cukup puas	68.5	3	10	12	69	6
Kurang/tidak puas	29.5	6	14	12	61	7
TT/TJ	2.0	0	0	18	47	34

Mayoritas dari massa pemilih Jokowi maupun Prabowo dan warga yang puas maupun yang tidak puas dengan kinerja Jokowi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Sikap terhadap UUD 1945 menurut Demografi (%)

		UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik	Beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik	Walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik	UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik	TT/TJ
GENDER						
Laki-laki	50.4	5	12	11	66	6
Perempuan	49.6	3	10	13	66	8
DESA-KOTA						
Pedesaan	50.3	5	7	11	70	7
Perkotaan	49.7	4	15	13	63	6
UMUR						
<=25 tahun	22.7	5	20	14	57	5
26-40 tahun	36.7	4	12	11	68	5
41-55 tahun	25.1	5	5	14	70	7
>55 tahun	15.5	2	7	9	70	13

Mayoritas warga di setiap segmen gender, desa-kota, dan umur tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Sikap terhadap UUD 1945 menurut Demografi (%)

		UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik	Beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik	Walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik	UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik	TT/TJ
PENDIDIKAN						
<= SD	31.8	4	7	9	67	14
SLTP	18.3	3	9	12	70	6
SLTA	34.1	5	14	12	66	2
PT	15.9	3	14	18	60	5
PENDAPATAN						
< 2 juta	55.8	4	11	10	67	9
2 - < 4 juta	26.1	5	11	13	67	4
>= 4 juta	18.0	4	13	18	60	5

Mayoritas warga pada setiap latar belakang pendidikan dan pendapatan tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Sikap terhadap UUD 1945 menurut Demografi (%)

		UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik	Beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik	Walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik	UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik	TT/TJ
ETNIS						
Jawa	40.8	4	11	13	66	5
Sunda	13.9	7	10	11	66	6
Batak	3.7	8	2	11	78	1
Madura	3.2	3	3	12	75	6
Betawi	2.6	0	6	12	74	7
Bugis	3.1	0	31	9	59	0
Minang	2.3	0	34	16	47	3
Lainnya	30.4	4	9	11	66	11
AGAMA						
Islam	87.6	4	11	12	67	6
Lainnya	12.4	4	11	10	63	12

Warga pada setiap latar belakang agama dan etnis tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Sikap terhadap UUD 1945 menurut wilayah (%)

		UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik	Beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik	Walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik	UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik	TT/TJ
WILAYAH						
SUMATERA	22.0	6	9	11	68	6
DKI+BANTEN	7.4	1	18	15	60	5
JABAR	15.3	7	15	12	60	6
JATENG+DIY	16.8	1	14	12	65	7
JATIM	16.3	4	9	17	66	3
LAINNYA	22.1	3	7	9	71	11

Mayoritas warga pada setiap wilayah tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Temuan

- ▶ Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih capres 2019, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945.

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Menurut Berbagai Kelompok Masyarakat

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden menurut Pemilih Partai (%)

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ
MASSA PEMILIH PARTAI							
PKB	10.0	11	83	6	10	86	4
Gerindra	9.9	12	86	2	14	86	0
PDIP	22.1	5	94	1	14	83	3
Golkar	11.3	18	78	4	12	84	4
Nasdem	4.2	0	100	0	8	92	0
PKS	6.0	13	87	0	15	76	9
PPP	2.3	14	83	3	7	89	4
PAN	1.4	6	94	0	7	93	0
Demokrat	8.6	11	83	6	13	83	4
Lainnya	5.5	6	88	5	7	89	4
TT/TJ	18.8	12	85	3	10	80	10

Mayoritas dari setiap pemilih partai tidak setuju presiden dipilih MPR, dan mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Menurut Pemilih Capres 2019 dan Kepuasan atas Kinerja Jokowi (%)

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ
MASSA PEMILIH CALON PRESIDEN 2019							
Joko Widodo - Ma'ruf Amin	55.5	9	88	3	12	83	5
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	44.5	12	85	3	11	86	3
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN JOKOWI							
Sangat/cukup puas	68.5	10	87	3	12	83	5
Kurang/tidak puas	29.5	10	87	3	12	86	2
TT/TJ	2.0	19	77	5	4	74	22

Mayoritas dari massa pemilih Jokowi maupun Prabowo dan warga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tidak setuju presiden dipilih MPR, dan pada umumnya ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden menurut Demografi (%)

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ
GENDER							
Laki-laki	50.4	11	87	2	10	85	4
Perempuan	49.6	9	87	4	13	82	5
DESA-KOTA							
Pedesaan	50.3	9	86	5	10	85	4
Perkotaan	49.7	11	88	1	13	82	5
UMUR							
<=25 tahun	22.7	7	92	2	14	83	3
26-40 tahun	36.7	7	89	4	11	86	3
41-55 tahun	25.1	12	86	1	12	82	6
>55 tahun	15.5	17	77	6	9	82	10

Mayoritas warga dari setiap kelompok gender, desa-kota, dan umur tidak setuju presiden dipilih MPR, dan mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden menurut Demografi (%)

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ
PENDIDIKAN							
<= SD	31.8	15	77	7	11	80	9
SLTP	18.3	8	92	0	10	87	4
SLTA	34.1	8	91	1	14	84	2
PT	15.9	7	92	1	11	86	3
PENDAPATAN							
< 2 juta	55.8	10	86	4	10	84	5
2 - < 4 juta	26.1	12	87	1	14	84	2
>= 4 juta	18.0	8	91	1	11	84	5

Mayoritas warga dari setiap kelompok Pendidikan dan pendapatan tidak setuju presiden dipilih MPR, dan mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden menurut Demografi (%)

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahan kan	TT/TJ
ETNIS							
Jawa	40.8	7	92	1	11	86	3
Sunda	13.9	14	84	2	12	79	8
Batak	3.7	16	83	1	17	78	5
Madura	3.2	20	80	0	16	82	2
Betawi	2.6	8	84	7	12	79	10
Bugis	3.1	12	88	0	19	81	0
Minang	2.3	10	90	0	11	83	6
Lainnya	30.4	11	83	6	11	84	6
AGAMA							
Islam	87.6	11	86	3	11	84	4
Lainnya	12.4	6	91	3	17	77	6

Mayoritas warga dari setiap kelompok etnis dan agama tidak setuju presiden dipilih MPR, dan mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Sikap terhadap Sistem Pemilihan & Masa Jabatan Presiden menurut Wilayah (%)

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ
WILAYAH							
SUMATERA	22.0	11	86	3	9	86	4
DKI+BANTEN	7.4	9	84	6	16	74	10
JABAR	15.3	13	86	1	10	83	7
JATENG+DIY	16.8	4	94	2	11	85	4
JATIM	16.3	10	89	0	12	86	1
LAINNYA	22.1	12	83	5	14	81	5

Mayoritas warga di setiap wilayah tidak setuju presiden dipilih MPR, dan mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Temuan

- ▶ Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih capres 2019, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden, dan seluruh lapisan demografi menginginkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.
- ▶ Mayoritas warga di setiap lapisan juga ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Berbagai Kelompok Masyarakat

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Massa Pemilih Partai (%)

	Base	Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
MASSA PEMILIH PARTAI				
PKB	10.0	13	84	4
Gerindra	9.9	11	86	3
PDIP	22.1	7	89	4
Golkar	11.3	10	74	16
Nasdem	4.2	12	86	2
PKS	6.0	14	85	2
PPP	2.3	18	75	7
PAN	1.4	11	83	6
Demokrat	8.6	12	77	11
Lainnya	5.5	13	81	7
TT/TJ	18.8	9	73	18

Setiap masa pemilih partai umumnya tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Pemilih Capres 2019 dan Kepuasan atas Kinerja Jokowi (%)

	Base	Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
MASSA PEMILIH CALON PRESIDEN 2019				
Joko Widodo - Ma'ruf Amin	55.5	10	82	8
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	44.5	12	80	8
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN JOKOWI				
Sangat/cukup puas	68.5	11	82	8
Kurang/tidak puas	29.5	10	80	10
TT/TJ	2.0	0	78	22

Pemilih Jokowi maupun Prabowo dan warga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi mayoritas tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Demografi (%)

	Base	Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	50.4	13	79	7
Perempuan	49.6	8	83	10
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.3	8	83	9
Perkotaan	49.7	13	79	8
UMUR				
<=25 tahun	22.7	9	83	8
26-40 tahun	36.7	11	82	7
41-55 tahun	25.1	10	81	8
>55 tahun	15.5	12	75	14

Mayoritas warga di setiap kelompok gender, desa-kota, dan umur tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Demografi (%)

	Base	Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	31.8	5	80	15
SLTP	18.3	8	90	2
SLTA	34.1	12	81	7
PT	15.9	21	74	5
PENDAPATAN				
< 2 juta	55.8	9	81	10
2 - < 4 juta	26.1	9	86	5
>= 4 juta	18.0	18	75	7

Mayoritas warga di setiap kelompok pendidikan dan pendapatan tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Demografi (%)

	Base	Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
ETNIS				
Jawa	40.8	12	81	7
Sunda	13.9	10	84	6
Batak	3.7	6	84	10
Madura	3.2	0	98	2
Betawi	2.6	19	70	11
Bugis	3.1	9	91	0
Minang	2.3	14	83	3
Lainnya	30.4	9	77	13
AGAMA				
Islam	87.6	11	81	8
Lainnya	12.4	9	78	13

Mayoritas warga di setiap kelompok etnis dan agama tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Pendapat tentang Presiden Bekerja Berdasarkan GBHN/PPHN menurut Wilayah (%)

	Base	Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
WILAYAH				
SUMATERA	22.0	7	85	9
DKI+BANTEN	7.4	11	74	16
JABAR	15.3	12	83	5
JATENG+DIY	16.8	13	83	4
JATIM	16.3	14	81	6
LAINNYA	22.1	9	77	14

Mayoritas warga di setiap wilayah tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Temuan

- ▶ Mayoritas warga di setiap kelompok pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun yang tidak puas dengan kinerja presiden Jokowi, dan di setiap lapisan demografi tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN, melainkan atas dasar janji program presiden pada masa kampanye.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- ▶ Dalam survei terakhir September 2021 warga yang menilai negara kita bergerak ke arah yang benar sebanyak 71%. Ini indikasi tidak ada masalah dasar yang dirasakan warga umumnya.
- ▶ Namun demikian muncul aspirasi di elite untuk melakukan perubahan pada dasar negara sekarang.
- ▶ Keinginan elite itu di tengah–tengah sikap warga yang pada umumnya tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945 dengan alasan apapun plus menilai UUD 1945 sejauh ini paling pas bagi bangsa Indonesia (78%).
- ▶ Secara lebih khusus muncul pemikiran–pemikiran yang merongrong sistem presidensialisme yang sedang kita anut sekarang: ada keinginan agar presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR; presiden bekerja menurut GBHN/PPHN yang ditetapkan MPR, bukan janji calon presiden kepada rakyat saat kamapnye. Tapi apa kata rakyat?

Kesimpulan

- ▶ Mayoritas rakyat, 87%, menolak jika Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi oleh MPR.
- ▶ Hanya 10% warga yang mendukung jika Presiden dipilih oleh MPR.
- ▶ Gagasan tentang presiden tidak dipilih langsung tapi dipilih oleh MPR ditolak oleh mayoritas warga di setiap pendukung partai maupun berbagai lapisan masyarakat.

Kesimpulan

- ▶ Mayoritas warga, 81%, lebih setuju Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
- ▶ Hanya 10% yang setuju Presiden bekerja menurut GBHN/PPHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR.

Kesimpulan

- ▶ Penolakan atas ide presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN dan bertanggung jawab pada MPR merata di setiap kelompok masyarakat.
- ▶ Mayoritas dari setiap pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, serta mayoritas warga pada setiap segmen demografi dan wilayah lebih menginginkan presiden bekerja atas dasar janji programnya pada masa kampanye dan bertanggung jawab pada rakyat.

Kesimpulan

- ▶ Rakyat umumnya (84%) menghendaki agar masa jabatan presiden 2 kali dipertahankan. Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 12%, dan yang tidak punya sikap 5%.
- ▶ Keinginan mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun ini mayoritas di setiap pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan juga mayoritas di setiap segmen demografi dan wilayah.
- ▶ Dari Mei 2021 ke September 2021, keinginan mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali tersebut naik dari 74% menjadi 84%.
- ▶ Maka gagasan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden yang berlaku sekarang (maksimal 2 kali dan masing-masing 5 tahun) semakin tidak didukung oleh rakyat pada umumnya.

Kesimpulan

- ▶ Secara lebih khusus, publik pada umumnya tidak setuju Presiden Jokowi kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya (62%). Yang setuju lebih sedikit, 34%, dan yang tidak menjawab 4%.
- ▶ Dari Mei 2021 ke September 2021 yang menolak Jokowi kembali menjadi calon presiden meningkat dari 53% menjadi 62%.
- ▶ Ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa semakin banyak warga yang menginginkan masa jabatan presiden dibatasi 2 kali saja, masing-masing 5 tahun.

Kesimpulan

- ▶ Beberapa waktu terakhir beredar kabar adanya gagasan mengundur pelaksanaan Pemilu 2024 ke 2027 karena alasan Pandemi COVID-19. Bagaimana sikap publik terhadap gagasan tersebut?
- ▶ Publik pada umumnya berpendapat bahwa Pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024, tidak diundur ke 2027, meskipun pandemi COVID-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat (84%).
- ▶ Hanya 13% yang berpendapat Pemilu 2024 harus diundur menjadi tahun 2027.
- ▶ Yang tidak tahu 4%.

Kesimpulan

- ▶ Di tengah sentimen rakyat yang secara umum positif terhadap arah bangsa, di mata publik tidak ada urgensi untuk mengamandemen kembali konstitusi kita terkait dengan hakekat presiden dan masa jabatan presiden.

Terima Kasih